



1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disebut dengan APBN merupakan gambaran umum rencana kinerja dan kebijakan pemerintah selama satu tahun ke depan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pengalokasian sumber daya ekonomi yang dimiliki, pendistribusian pendapatan dan kekayaan negara melalui suatu rumusan kebijakan, serta merefleksikan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan percepatan kinerja ekonomi nasional. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sejatinya merupakan alat utama pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya sekaligus sebagai alat untuk mengelola perekonomian negara. Perwujudan kondisi APBN yang sehat dan berkelanjutan merupakan salah satu pijakan bagi peningkatan kinerja ekonomi nasional sekaligus sebagai tolok ukur utama dari kesehatan perekonomian nasional.

Belanja pemerintah pusat dalam postur APBN memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan *output* nasional, serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian (Direktorat Penyusunan APBN 2013). Peran strategis belanja pemerintah pusat dalam memacu pertumbuhan nasional menjadikan perencanaan anggaran sebagai salah satu proses yang sangat krusial dalam penyusunan APBN. Perencanaan anggaran yang baik dengan mekanisme yang tepat diharapkan mampu mendorong penggunaan anggaran belanja yang mampu mendukung pemerintah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi sistem perencanaan anggaran yang baik juga sangat penting dalam menciptakan suatu mekanisme penganggaran yang lebih responsif serta mampu memfasilitasi upaya pemerintah dalam memenuhi tuntutan akan peningkatan kinerja yang diwujudkan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Perwujudan mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran negara yang efektif dan efisien mendorong pemerintah untuk melaksanakan reformasi bidang perencanaan dan penganggaran yang dimulai pada tahun anggaran 2005 melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut atas penerbitan peraturan perundangan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Paket peraturan perundangan tersebut pada dasarnya menekankan pada perwujudan konsep penganggaran

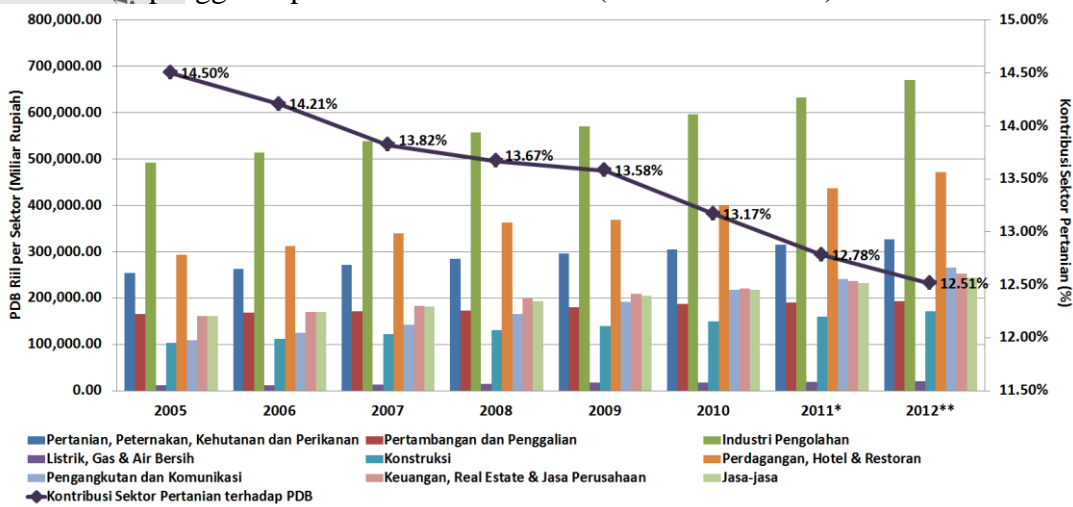
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK), serta kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).

Perencanaan dan perumusan kebijakan anggaran sektor publik merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintah. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya *underfinancing* atau *overfinancing* yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Situasi demikian akan menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana publik (*public money*) habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, dan koordinator dalam proses pembangunan nasional (Mardiasmo 2002).

Sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai sumber penghasilan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Hampir setengah dari jumlah angkatan kerja di Indonesia bekerja pada sektor ini. Sektor pertanian merupakan sumber penghasil bahan makanan pokok, dimana ketahanan pangan merupakan syarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi dan politik. Sektor pertanian memiliki posisi penting sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) serta sebagai penyumbang devisa yang relatif besar (Solahuddin 2009). Sektor pertanian juga terbukti memiliki daya tahan yang cukup tinggi dalam menghadapi guncangan krisis ekonomi dibandingkan dengan sektor lain. Kinerja sektor pertanian pasca krisis ekonomi telah membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan *leading sektor* dan penggerak perekonomian nasional (Solahuddin 2008).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013)

Gambar 1 PDB riil berbagai sektor di Indonesia atas dasar harga konstan tahun 2000 dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia tahun 2005-2012

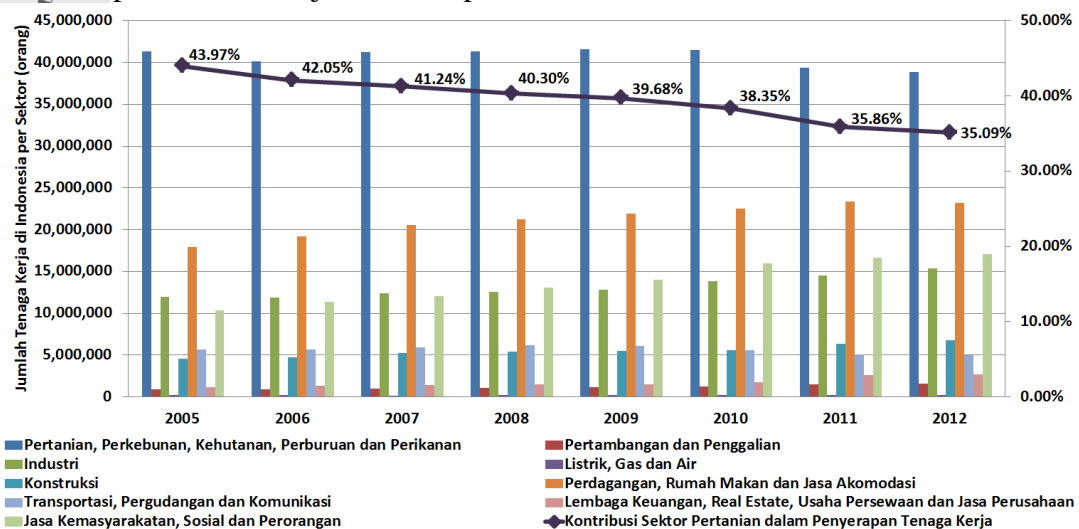
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia jika dibandingkan dengan sektor lainnya relatif tinggi. Selama periode tahun 2005-2012, PDB sektor pertanian menempati urutan ketiga setelah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (Gambar 1). Pada tahun 2005-2012, PDB riil sektor pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3.41 persen per tahun.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Namun demikian, pertumbuhan PDB sektor pertanian ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan kontribusinya terhadap PDB nasional. Kontribusi PDB sektor pertanian terhadap PDB nasional justru cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2005, sektor pertanian berkontribusi sebesar 14.21 persen terhadap PDB Indonesia, kemudian terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2012, kontribusi PDB sektor pertanian terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 12.51 persen.

Peran sektor pertanian dalam menyediakan lapangan kerja juga sangat strategis, mengingat hampir setengah dari jumlah tenaga kerja di Indonesia menumpukan kehidupannya pada sektor ini. Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2, sektor pertanian hingga saat ini merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada tahun 2012, dari total 110,808,154 tenaga kerja di Indonesia, sebanyak 38,882,134 atau sebesar 35.09 persen diantaranya bekerja pada sektor pertanian. Data tersebut menggambarkan bahwa upaya pemerintah untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan lebih efektif dilakukan melalui pembangunan di sektor pertanian. Hal ini menjadikan Kementerian Pertanian (Kemtan) sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia melalui perbaikan kinerja di sektor pertanian.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013)

Gambar 2 Jumlah tenaga kerja Indonesia per sektor tahun 2005-2012

Kebijakan pemerintah jangka menengah dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Dalam rumusan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, pemerintah menerapkan *Triple Track Strategy* yang mencakup stabilitas ekonomi makro; pengembangan sektor riil melalui pembangunan infrastruktur; serta pemberdayaan usaha mikro melalui revitalisasi pertanian dan pedesaan, dalam rangka percepatan pembangunan nasional. Penguatan dan pembangunan sektor pertanian dan perdesaan dalam hal ini telah disadari oleh pemerintah sebagai suatu langkah penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian salah satunya diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran belanja Kemtan secara signifikan.

Tabel 1 Perkembangan alokasi belanja dan realisasi penggunaan anggaran Kementerian Pertanian per triwulan periode tahun 2005-2012 (dalam juta rupiah)

Tahun	Pagu Anggaran (juta Rp)	Realisasi Penggunaan Anggaran							
		Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
		(juta Rp)	(%)	(juta Rp)	(%)	(juta Rp)	(%)	(juta Rp)	(%)
2005	4,679,198	87,139	1.86	255,083	5.45	745,341	15.93	1,985,069	42.42
2006	6,428,579	357,720	5.56	793,549	12.34	1,469,621	22.86	3,044,516	47.36
2007	8,954,318	284,966	3.18	1,072,896	11.98	1,402,464	15.66	3,890,877	43.45
2008	8,445,091	271,745	3.22	1,037,385	12.28	1,851,267	21.92	4,114,478	48.72
2009	8,690,859	323,755	3.73	1,384,133	15.93	1,769,294	20.36	4,205,960	48.40
2010	8,951,179	348,717	3.90	1,319,105	14.74	1,769,512	19.77	4,577,927	51.14
2011	17,601,545	511,426	2.91	3,510,746	19.95	3,897,233	22.14	8,007,540	45.49
2012	19,647,278	2,234,265	11.49	4,965,132	25.53	2,920,509	15.02	8,141,570	41.86

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013)

Pada tahun 2005, anggaran belanja Kemtan hanya sebesar Rp.4,679,198,455,000,- dan mengalami peningkatan sebesar 320 persen di tahun 2012 dengan alokasi belanja sebesar Rp.19,647,277,924,000,-. Pada APBN tahun 2013 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp.17,819,545,212,000,- untuk menunjang kinerja Kemtan. Peningkatan alokasi belanja Kemtan juga didukung dengan semakin baiknya tingkat penyerapan alokasi belanja, yang menunjukkan optimalisasi penggunaan anggaran semakin baik (Tabel 1). Namun demikian, realisasi penggunaan anggaran belanja Kemtan dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan pola penyerapan yang bertumpuk di akhir tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kendala pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran serta proses perencanaan pelaksanaan kegiatan yang kurang baik.

Tabel 2 Tingkat produksi beberapa komoditas pertanian Indonesia periode tahun 2005-2012 (dalam ribu ton)

Jenis Komoditas	Produksi (Ribu Ton)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Padi	54,151.1	54,454.9	57,157.4	60,325.9	64,398.9	66,469.4	65,756.9	68,956.3
Jagung	12,523.9	11,609.5	13,287.5	16,317.3	17,629.8	18,327.6	17,643.3	18,961.7
Kedelai	808.4	747.6	592.5	775.7	974.5	907.0	851.3	783.2
Kacang Tanah	836.3	838.1	789.1	770.1	777.9	779.2	691.3	709.1
Kacang Hijau	321.0	316.1	322.5	298.1	314.5	291.7	341.3	295.9
Ubi Kayu	19,321.2	19,986.6	19,988.1	21,757.0	22,039.1	23,918.1	24,044.0	22,677.9
Ubi Jalar	1,857.0	1,854.2	1,886.9	1,881.8	2,057.9	2,051.1	2,196.0	2,438.1

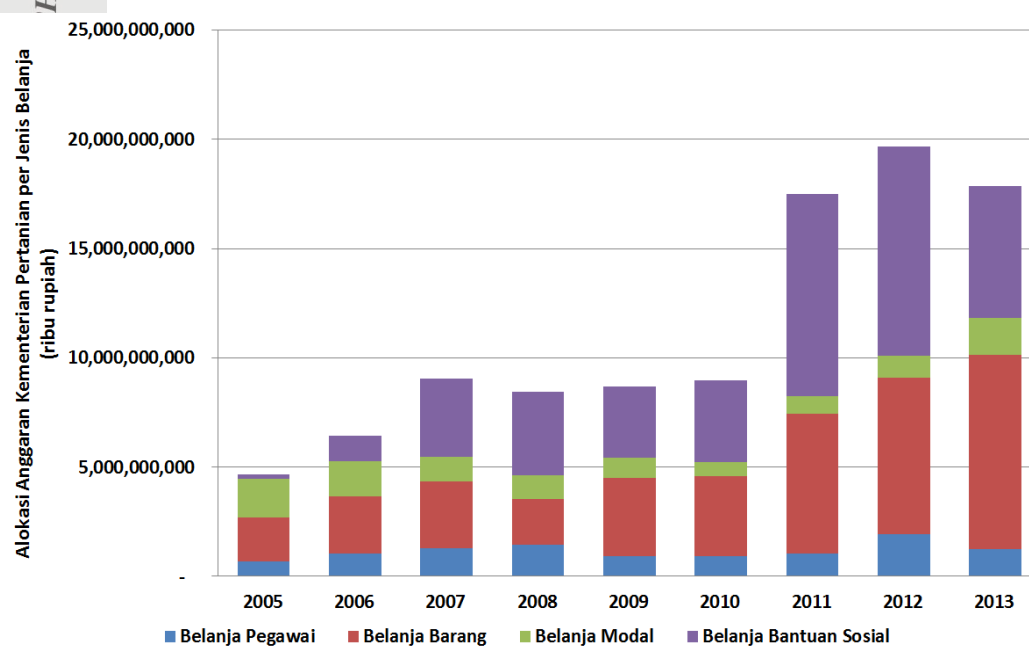
Sumber: Badan Pusat Statistik (2013)



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Peningkatan alokasi belanja dan penyerapan anggaran Kemtan yang cukup besar ternyata tidak serta merta mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian secara signifikan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan produksi komoditas pertanian yang masih rendah (Tabel 2). Tingkat produksi komoditas pangan nasional hingga saat ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan impor komoditas pertanian, terutama pangan secara tidak langsung juga telah menurunkan kinerja sektor pertanian. Kedaulatan pangan yang menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan stabilitas suatu bangsa hingga saat ini juga belum mampu diwujudkan oleh pemerintah.

Alokasi jenis belanja Kemtan yang paling mendominasi adalah belanja barang dan belanja bantuan sosial, sedangkan belanja modal memiliki porsi yang relatif sangat kecil dibandingkan kedua jenis belanja tersebut (Gambar 3). Porsi belanja modal di Kemtan pada tahun 2012 hanya sebesar 4.89 persen, jauh dibawah belanja barang dan belanja bantuan sosial yang memiliki porsi masing-masing sebesar 36.48 persen dan 48.92 persen. Porsi jenis belanja ini tidak mengalami perubahan signifikan pada tahun anggaran 2013, dimana alokasi jenis belanja modal hanya sebesar 6.43 persen, sedangkan alokasi anggaran untuk jenis belanja barang dan belanja bantuan sosial memiliki porsi masing-masing sebesar 49.77 persen dan 36.78 persen.



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2013)

Gambar 3 Alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian berdasarkan jenis belanja periode tahun 2005-2013

Kecilnya porsi jenis belanja modal dinilai kurang efektif dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Akhmad *et al.* (2012) yang berjudul *Impact of Fiskal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South Sulawesi Indonesia* menyimpulkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah untuk jenis belanja infrastruktur sektor pertanian berpengaruh nyata terhadap peningkatan PDRB di Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

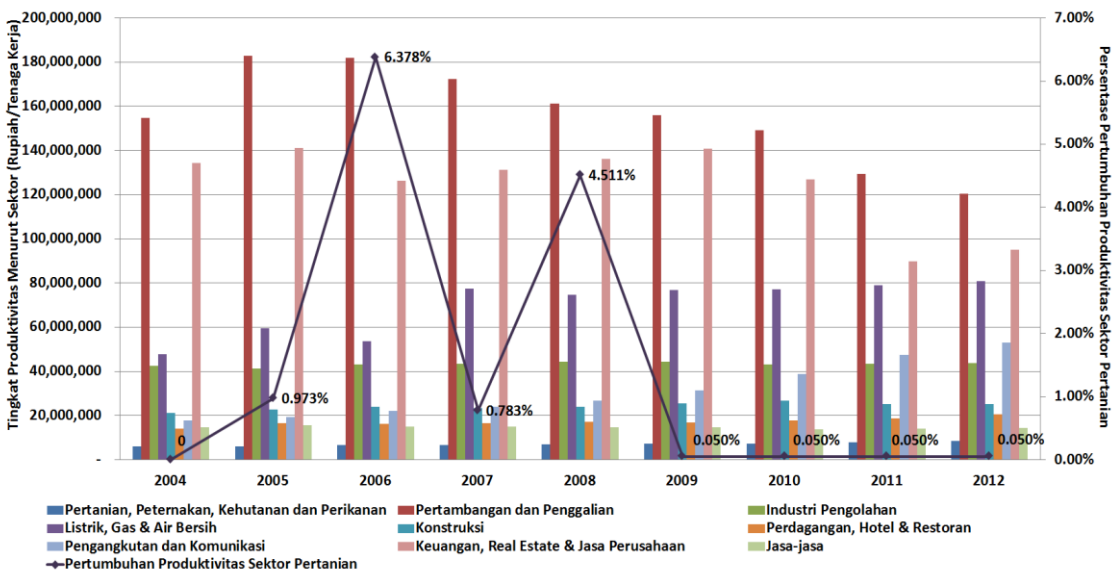
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

realokasi belanja barang ke belanja modal dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan PDRB di Sulawesi Selatan dibandingkan dengan kebijakan untuk meningkatkan transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut Hartati (2012), komposisi alokasi anggaran pemerintah yang tidak proporsional dan tidak efektif menyebabkan rendahnya peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontribusi sektor pertanian yang begitu nyata bagi pembangunan di Indonesia seharusnya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam pembangunan perekonomian nasional sangat diperlukan dalam rangka menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan dan mesin penggerak perekonomian nasional. Kebijakan belanja pemerintah, sebagai salah satu generator peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam hal ini bukan hanya perlu ditingkatkan besarnya, namun juga memerlukan suatu mekanisme perencanaan yang tepat agar besarnya alokasi anggaran secara efektif mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan Masalah

Penguatan dan pembangunan sektor pertanian pada dasarnya tengah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Sektor pertanian hingga saat ini menjadi sektor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui kontribusinya terhadap PDB dan sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbanyak. Peran strategis sektor pertanian ini ternyata belum diikuti dengan pencapaian tingkat produktivitas yang memuaskan. Berdasarkan Gambar 4, selama satu dekade terakhir produktivitas sektor pertanian masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas sektor non pertanian.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2013)

Gambar 4 Produktivitas tenaga kerja per sektor di Indonesia tahun 2004-2012



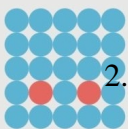
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4, produktivitas rata-rata sektor pertanian selama periode tahun 2004-2012 hanya sebesar Rp.7,131,098,-, dimana nilai ini menunjukkan bahwa satu orang tenaga kerja di sektor pertanian hanya mampu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp.7,131,098,- setiap tahunnya. Nilai produktivitas yang dihasilkan oleh sektor pertanian masih jauh dibawah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, yang menghasilkan produktivitas masing-masing sebesar Rp.156,619,417,- dan Rp.123,425,844,-. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan produktivitas antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian. Sebagaimana dikemukakan oleh Tambunan (2010), adanya kesenjangan produktivitas yang tinggi antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian merupakan petunjuk bahwa transformasi ekonomi dan teknologi kurang berjalan dengan baik.

Implementasi penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagai kerangka konseptual dalam reformasi perencanaan penganggaran yang dimulai sejak tahun 2005 serta peningkatan besaran alokasi belanja Kemtan secara signifikan ternyata belum mampu meningkatkan kinerja sektor pertanian secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme perencanaan dan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran di Kemtan. Pelaksanaan konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang diharapkan serta pengalokasian anggaran ke dalam program kerja dan kegiatan yang kurang tepat, ditengarai menjadi bagian dari permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja sektor pertanian. Jika kondisi ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, peningkatan alokasi dan realisasi belanja di Kemtan setiap tahunnya dengan harapan akan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya hanya akan menjadi suatu beban pemerintah tanpa disertai dengan hasil kinerja pembangunan yang optimal.

Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam kesesuaian implementasi penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) di Kemtan dengan prinsip dan komponen yang membentuk konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM, sebagaimana tertuang dalam pedoman dan kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh realisasi belanja pada program kerja di Kemtan terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Permasalahan yang ingin dianalisis dan dijawab dalam penelitian ini mencakup:

1. Apakah implementasi penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian telah sesuai dengan konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM sebagaimana diamanatkan dalam pedoman dan kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran?
2. Bagaimana pengaruh belanja Kementerian Pertanian untuk program penelitian dan penyuluhan pertanian; pengembangan prasarana dan sarana pertanian; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian; serta subsidi benih dan pupuk terhadap kinerja sektor pertanian?



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian serta mengkaji program kerja di Kemtan yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja di sektor pertanian. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kesesuaian implementasi penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L) di Kementerian Pertanian dengan konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM, sebagaimana diamanatkan dalam pedoman dan kebijakan mengenai perencanaan dan penganggaran, sejak dimulainya reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
2. Menganalisis pengaruh realisasi belanja Kementerian Pertanian untuk program penelitian dan penyuluhan pertanian; pengembangan prasarana dan sarana pertanian; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas pertanian; serta subsidi benih dan pupuk terhadap kinerja sektor pertanian.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, sebagai bahan rekomendasi dalam perbaikan mekanisme proses penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta dapat menjadi bahan kajian dalam proses pengalokasian anggaran ke dalam program kerja dan kegiatan yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat;
2. Bagi peneliti dan pemerhati sektor pertanian, sebagai salah satu bahan kajian dalam menganalisis kebijakan belanja negara serta sebagai bahan referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis kesesuaian proses penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) di Kemtan dengan prinsip dan komponen yang membentuk konsep penganggaran terpadu, PBK dan KPJM, sebagaimana tertuang dalam paket kebijakan pengelolaan keuangan negara serta pedoman reformasi perencanaan dan penganggaran. Penelitian dibatasi pada pengkajian data dan informasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sejak dilaksanakannya reformasi bidang perencanaan dan penganggaran, yakni sejak tahun anggaran 2005. Paket kebijakan yang diacu dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

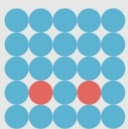


Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Negara/Lembaga (RKA-K/L), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.

Penelitian terkait dengan analisis pengaruh realisasi belanja program kerja dan kegiatan di Kemtan terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian dibatasi untuk periode tahun 2005-2012. Tahun 2005 ditetapkan sebagai tahun dasar dikarenakan tahun anggaran 2005 merupakan titik awal dimulainya penerapan beberapa amanat dalam peraturan perundangan terkait dengan reformasi perencanaan dan penganggaran. Tahun 2005 juga merupakan tahun dasar diterapkannya pencatatan keuangan negara dengan sistem *single account* melalui dihilangkannya terminologi belanja pembangunan dan belanja rutin yang telah digunakan selama lebih dari 30 tahun. Penggunaan aplikasi RKA-K/L untuk menggantikan aplikasi DIP/DIK juga merupakan batasan dalam memperoleh data realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian per program, per kegiatan, untuk setiap triwulan. Sektor pertanian yang dianalisis hanya mencakup sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan, tanpa menganalisis sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan, karena merupakan domain dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Publikasi milik IPB, tahun 2013



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.